

URGENSI PENDIDIKAN DEMOKRASI DALAM KONTEKS BERBANGSA

Mori Dianto¹, Ainun Nuraida², Dhea Rizky Fitri Saragi³, Ipak Sinantin⁴, Isnaini
Alya Amanda⁵, Khairunnisa⁶, Nanda Nabilah⁷, Nazhira Azmi⁸, Puti Miratil Hayati
Efri⁹, Riski Andriani¹⁰, Tita Artita¹¹

¹ Universitas PGRI Sumatera Barat

²⁻¹¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email: ¹moridianto@gmail.com, ²nandanabilah1409@gmail.com

ABSTRAK

Demokrasi di Indonesia belum seperti yang diharapkan, banyak timbul persoalan persoalan yang menyangkut pelanggaran HAM, nilai egalitarian belum tersosialisasikan, kebenaran diputar balikkan dan terjadi mafia peradilan. Kondisi bangsa semakin terpuruk, pejabat mementingkan dirinya sendiri, timbul kelompok-kelompok partisan yang sulit dikontrol pemerintah. Dalam kondisi di atas sangat diperlukan pendidikan demokrasi yang diharapkan dapat memberikan solusi pemecahan segala persoalan berbangsa dan bernegara. Adapun tujuan dari penulisan ini yaitu memahami arti pendidikan demokrasi, tujuan pendidikan demokrasi dan pentingnya pendidikan demokrasi dalam konteks berbangsa. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan studi pustaka dan kombinasi antar referensi serta pembacaan data. Dengan mengandalkan bibliografi seperti artikel ilmiah dan buku yang relevan dengan tajuk pembahasan. Adapun hasil dari penulisan ini yaitu Pendidikan demokrasi dalam konteks berbangsa memegang peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi karakteristik bangsa menjadi berpikir kritis dan analitis. Upaya untuk mewujudkan system pendidikan yang demokratis menjadi keharusan yang perlu disikapi secara positif oleh seluruh praktisi pendidikan. Pendidikan demokrasi seseorang itu mempelajari orientasi sikap dan perilaku politik, membangun manusia yg amanah, bisa menghargai pendapat orang lain, dan harus tetap bersosialisasi serta harus tetap mempelajari nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi.

Kata Kunci: Pendidikan Demokrasi, Bangsa

ABSTRACT

Democracy in Indonesia has not been as expected, there have been many issues relating to human rights violations, egalitarian values have not been socialized, the truth has been distorted and the judicial mafia has occurred. The condition of the nation is getting worse, officials position themselves, giving rise to partisan groups that are difficult for the government to regulate. In the conditions above, democracy education is needed which is expected to provide solutions to all problems of the nation and state. The purpose of this paper is to understand the meaning of democracy, the purpose of democracy education and the importance of democracy education in the context of the nation. This writing uses a literature study approach and a combination of references and data reading. By relying on bibliographies such as scientific articles and books that are relevant to the topic of discussion. The results of this paper are that democratic education in the context of the nation plays a very important role in influencing the characteristics of the nation to think critically and analytically. Efforts to realize a democratic education system is a necessity that needs to be addressed positively by all education practitioners. A person's democratic education learns the orientation of political attitudes and behavior, builds human beings who are trustworthy, can respect the opinions of others, and must continue to socialize and must continue to learn the values contained in democracy.

Kata Kunci: *Democratic Education, Nation*

PENDAHULUAN

Demokrasi berasal dari bahasa (epistemologis) dan istilah (terminologis). Secara epistemologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “cretein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa demos-cratein atau demoscraos adalah keadaan Negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah rakyat dan oleh rakyat (Sulisworo, 2012:2).

Menurut Joseph A. Schmitter, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat; Menurut Sidney Hook, demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan- keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa menurut Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl, demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung

melalui kompetisi dan kerjasam dengan para w mereka yang telah terpilih(Wasyiem,dkk,2021:86).

Demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa Negara. Seperti diakui oleh Moh. Mahfud MD, ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. Pertama, hampir semua negara didunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental.; Kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan Negara sebagai organisasi tertingginya. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang benar pada warga masyarakat tentang demokrasi (Sulisworo, 2012:2).

Pendidikan demokrasi tidak hanya urgen bagi negara-negara yang sedang berada dalam transisi menuju demokrasi seperti Indonesia, tetapi juga bagi negara- negara yang telah mapan demokrasinya. Kenyataan inilah yang terlihat misalnya dari pembentukan "Civitas International" pada Juni 1995 di Praha madiri tidak kurang dari 450 pemuka pendidikan demokrasi dari 52 negara, para peserta sepakat membentuk "Civitas International" yang menyimpulkan pentingnya pendidikan demokrasi bagi penumbuhan "civic culture" untuk keberhasilan pengembangan dan peme- liharaan pemerintahan demokratis (demo- cratic governance)(Azara, 2003. Hal 221).

Jika tidak adanya demokrasi pemaknaan demokrasi di Indonesia belum terealisasikan sepenuhnya, hal ini terlihat dari banyaknya konflik yang terjadi karena adanya rasa kebebasan terhadap sesuatu yang bersifat fundamental, seperti hak untuk memperoleh dan memberikan informasi. Demokratisasi sangat menyoroti kebebasan dalam berkarya, berekspresi dalam ruang sosial masyarakat, termasuk berkomunikasi, berpikir, berpendapat, dll. Namun, menurut Robert Dahl hal yang paling menentukan demokrasi pada suatu negara adalah dimana masyarakatnya mampu menerapkan kebebasan kebebasan yang bersifat fundamental seperti yang telah dijelaskan diatas dengan baik dan benar, sehingga tidak akan terjadi konflik konflik yang akan merusak ketertiban dan citra bangsa. Indonesia merupakan negara yang minim akan pengalaman berdemokrasi maka akan selalu ada "percobaan-percobaan" yang kerap kali jatuh bangun

sehingga hal ini akan sangat tergantung dengan kesabaran semua pihak baik oleh pemerintahan maupun masyarakatnya. Demokratisasi bangsa merupakan proses panjang yang akan sangat melelahkan, maka kita perlu upaya upaya yang mempercepat bangsa Indonesia untuk berdemokrasi, salah satunya adalah jalan pendidikan (Berlian, 2021, Hal 487).

Perjuangan menegakkan demokrasi adalah upaya untuk menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Demokrasi diyakni sebagai sistem politik dan pandangan hidup yang dapat menjamin penghargaan atas hak dasar manusia yang selanjutnya memberi perlindungan dan penegakkan terhadap hak dasar tersebut. Maka, unsur pokok dari sebuah demokrasi adalah perwujudan dari pengakuan akan hak asasi manusia. Demokrasi akan senantiasa berhubungan dengan hak asasi manusia, hal ini terlihat dari adanya isu dan gerakan dari berbagai negara untuk pengglobalan demokrasi dan hak asasi manusia yang diterapkan dengan sebagai berikut pertama Keinginan dari masing masing negara untuk dikatakan sebagai negara demokrasi dengan menyusun suatu pemerintahan demokrasi dan meratifikasi berbagai konvensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia. Kedua HAM dan Demokrasi menjadi persyaratan bag negara negara dalam menjamin hubungan Internasional. Ketiga Jika ada pelanggaran disuatu negara, itu bukan hanya urusan intern lagi, melainkan organisasi internasional berhak untuk menegakkan hak asasi manusia dan demokrasi di negara tersebut. (Berlian, 2021, Hal 487).

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan menekankan analisis dari sumber sumber yang sudah ada. Yang dimaksud dengan studi pustaka adalah usaha yang dilakukan oleh penulis untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah dan artikel jurnal. Pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan teknik dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk melacak dokumen, data dan informasi baik yang berupa buku, majalah, jurnal ilmiah, artikel, dan lain sebagainya yang relevan dengan penulisan ini. Untuk menganalisa data, penulis menggunakan *content analysis*

(analisis isi). *Content analysis* adalah suatu metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen. Tujuan dari analisis data dalam penulisan adalah memecahkan masalah-masalah penulisan, memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah diajukan dalam penulisan serta sebagai bahan untuk membuat simpulan dan saran yang berguna untuk kebijakan penulisan selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Arti Pendidikan Demokrasi

Pendidikan Kewarganegaraan itu sama dengan Pendidikan Demokrasi. Pendidikan Kewarganegaraan yaitu; suatu proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan di mana seseorang mempelajari orientasi, sikap dan perilaku politik sehingga yang bersangkutan memiliki pengetahuan politik serta kemampuan mengambil keputusan politik secara rasional dan menguntungkan bagi dirinya juga bagi masyarakat dan bangsa (Budi Juliardi, 2015: 120-121). Pendidikan demokrasi adalah proses penyadaran untuk membangun manusia amanah (bisa dipercaya). Seseorang yang bisa dipercaya memiliki keberanian mengambil tanggung jawab karena dia tidak bergantung kepada orang lain, karena amanah mengandung sikap mandiri (Fuad fahrudin, 2006: 156).

Dalam konteks demokrasi, pendidikan penting untuk membangun kesadaran setiap orang bahwa mereka perlu mencapai kedewasaan dengan berdasarkan penghargaan terhadap orang lain, sehingga menumbuhkan kesederajatan. Selain itu, yang terpenting adalah pendidikan merupakan media untuk memupuk sikap empati dan toleran. Dan juga pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama di dalam berlangsungnya proses pendidikan antara pendidik dan anak didik, serta pengelola pendidikan (Winataputra, 2001 : 10).

Pendidikan demokrasi dapat dipahami sebagai suatu proses sosialisasi, internalisasi, dan aktualisasi konsep, dan nilai-nilai demokrasi melalui proses pembelajaran berlangsung. Dalam kaitan ini, upaya untuk mewujudkan system pendidikan yang demokratis menjadi keharusan yang perlu disikapi secara positif oleh

seluruh praktisi pendidikan. Selain itu Paradigma pendidikan demokrasi secara eksplisit yang menjadi concern dari proses penyelenggaraan pendidikan di Negara hukum Republik Indonesia yang tertuang pada UU No. 20 tahun 2003 Pasal 4 yang menjelaskan pendidikan diselenggarakan secara demokratis, tidak diskriminatif, dengan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa (Rosyad &Maarif, 2020:81).

Dari 4 ahli ini memiliki pendapat yang berbeda- beda, dimana menurut pendapat yang pertama yaitu pendidikan demokrasi itu seseorang mempelajari orientasi sikap dan perilaku politik, nah jadi Disini kita dimaksud untuk harus mempunyai sikap kepolitikan. Pendapat yang kedua menjelaskan mengenai pendidikan demokrasi harus membangun manusia yg amanah ,nah maksudnya kita harus bisa dipercaya dalam melakukan kegiatan apapun termaksud dalam dunia demokrasi. Yang ketiga mengatakan bahwa mencapai kedewasaan harus berdasarkan penghargaan terhadap orang lain, nah maksudnya kita harus bisa menghargai pendapat orang lain dan menghormati orang lain tidak boleh egois dalam berpendapat. Yang ke empat yaitu proses sosialisasi dan nilai-nilai demokrasi memulai proses pembelajaran berlangsung,nah maksudnya kita harus tetap bersosialisasi dan harus tetap mempelajari nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi.

2. Tujuan Pendidikan Demokrasi

Pendidikan Kewarganegaraan itu sama dengan Pendidikan Demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat untuk dapat berfikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru bahwa kesadaran demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat. Pendidikan Kewarganegaraan adalah Pendidikan Demokrasi yang bertujuan untuk mendidik generasi muda menjadi warga negara yang demokratis dan partisipatif melalui suatu pendidikan yang diagonal” (Budi Juliardi, 2015: 120-121). Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis.(Tjipto Subadi, 2007:15).

Pendidikan demokrasi bertujuan mempersiapkan warga negara untuk berperilaku dan bertindak demokratis, melalui aktivitas yang menanamkan pada

generasi muda akan pengetahuan, kesadaran, dan nilai-nilai demokrasi Lebih lanjut dikatakan bahwa pendidikan demokrasi harus mampu melahirkan manusia-manusia yang demokratis. Tanpa manusia yang memegang teguh nilai-nilai demokrasi masyarakat yang demokrasi hanya akan merupakan impian belaka (Suryadi, K, 1999:23-24)

Tujuan demokrasi ialah untuk mendidik warga negara yang sejati yang bersedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara dan masyarakat dengan ciri-ciri sebagai berikut perasaan bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa perasaan cinta kepada negara perasaan cinta kepada bangsa dan kebudayaan perasaan berhak dan wajib ikut memajukan negaranya menurut pembawaan dan kekuatannya keyakinan bahwa orang menjadi bagian tak terpisahkan dari keluarga dan masyarakat keyakinan bahwa orang yang hidup bermasyarakat harus tunduk pada tata tertib keyakinan bahwa pada dasarnya manusia itu sama derajatnya sehingga sesama anggota masyarakat harus saling menghormati, berdasarkan rasa keadilan dengan berpegang teguh pada harga diri dan keyakinan bahwa negara memerlukan warga negara yang rajin bekerja, mengetahui kewajiban, dan jujur dalam pikiran dan tindakan (Winarno, 2001:150)

Hasilnya yaitu Pendidikan demokratis secara garis besar memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mendidik warga negara Indonesia agar dapat memiliki jiwa kebersamaan dan dapat menyumbangkan pendapat pendapat yang berbeda, pendidikan demokrasi juga bisa dilihat dari sudut pandang sila pertama yaitu ketuhanan yang memiliki rasa cinta terhadap negara nya dan merasa mempunyai kewajiban untuk memajukan negara nya bersama sama.

3. Pentingnya Pendidikan Demokrasi dalam Konteks Berbangsa

Pendidikan demokrasi sangat penting karena mempengaruhi karakteristik bangsa, karena Nu'man Soemantri menjelaskan bahwa pendidikan demokrasi yang berkembang dengan berkembangnya sumber-sumber ilmu lain, dan berdampak besar bagi pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Agar berdampak positif, semua ini telah dilatih untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa. Melakukan tindakan demokrasi secara analitis dan mempersiapkan kehidupan demokrasi yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 (Zulfikar&Dewi, 2021:107).

Pendidikan dapat menjadi salah satu upaya strategis pendemokrasian bangsa indonesia, khususnya di kalangan generasi muda. pendidikan yang dimaksud adalah

model pendidikan yang berorientasi pembangunan karakter bangsa melalui pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek pembelajaran melalui cara-cara pembelajaran yang demokratis, partisipatif, kritis, kreatif, dan menantang aktualisasi diri mereka. Dalam konteks ini, proses belajar tidak lagi menjadi monopoli dosen maupun guru, tetapi menjadi milik bersama dan menjadikan proses belajar sebagai wadah untuk dialog dan belajar bersama (Ulfa&Trihastuti, 2021:329-346).

Dalam mensosialisasikan nilai-nilai demokrasi pemimpin formal dan non formal bertanggung jawab untuk mewujudkan kehidupan demokrasi baik ranah organisasi negara (state), organisasi masyarakat (civil state), ranah institusi dunia usaha (market institution). Semua pejabat negara, pejabat pemerintah mempunyai tanggung jawab menjadikan jabatannya sebagai media pembelajaran pendidikan demokrasi (Khuzaimah, 2022:41-49).

Hasilnya yaitu Pendidikan demokrasi sangat penting karena sangat mempengaruhi karakteristik bangsa. Adapun beberapa pendapat dari berbagai sudut seberapa penting pendidikan seperti pengaruh Pendidikan demokratis pada siswa untuk mengasah kemampuan berpikir kritis dan analitis. Pendidikan demokratis juga mewujudkan adanya wadah yang bebas untuk belajar maupun berpendapat tanpa adanya batas status sosial yang membantu bangsa untuk melakukan pembelajaran yang partisipatif, kritis, kreatif, dan menantang aktualisasi diri mereka. Bahkan untuk menjadi seorang pemimpin jiwa demokratis harus dimiliki karena menjadi salah satu tanggung jawab sebagai pemimpin.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, diperoleh kesimpulan bahwa pendidikan demokrasi dapat dijadikan acuan sebagai tempatnya lembaga pendidikan seseorang dimulai dari penyesuaian, sikap serta perilaku politik yang mampu diaplikasikan dalam bermasyarakat dan berbangsa. Pendidikan ini sangat penting agar setiap orang menyadari bahwa mereka harus dewasa dalam menghormati orang lain sehingga dapat menumbuhkan kesetaraan sesama. Pendidikan demokrasi ini juga mewujudkan keberadaan tempat belajar dan dapat berpendapat secara bebas tanpa terkendala status

sosial, membantu bangsa mewujudkan pembelajaran yang inklusif, kritis dan kreatif serta menantang realisasi diri.

Oleh karena itu, pendidikan ini bertujuan untuk mendidik warga negara tentang perilaku dan tindakan demokrasi melalui sarana yang memberikan pengetahuan, kesadaran dan nilai-nilai tentang demokrasi kepada generasi muda. Tidak hanya generasi muda, bahkan sekelas pejabat negara dan pejabat pemerintah pun mempunyai tanggung jawab menjadikan jabatannya sebagai media pembelajaran pendidikan demokrasi. Maka untuk menjadi seorang pemimpin jiwa demokratis harus dimiliki, karena menjadi salah satu tanggung jawab seorang pemimpin.

REFERENSI

- Azra, A. (2002). Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Demokrasi Indonesia. Yogyakarta : Warta PTM. Hal 221
- Berlian, K, R. (2021). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membentuk Negara Demokratis Dan Mewujudkan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan undiksha*, vol 9 no 2. Hal 487
- Fachruddin,F.(2006). Agama dan Pendidikan Demokrasi Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Juliardi, B. (2015). Implementasi pendidikan karakter melalui pendidikan. kewarganegaraan. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, 2(2), 3.
- Khuzaimah, K., & Pribadi, F. (2022). Penerapan Demokrasi Pendidikan pada Pembelajaran Siswa di Sekolah Dasar. *Al-Maarief : Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya*, 4(1), 41-49.
- Rosyad, A. M., & Maarif, M. A. (2020). Paradigma Pendidikan Demokrasi Dan Pendidikan Islam Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi Di Indonesia. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 75-99.
- Subadi, T. (2007). *Pendidikan kewarganegaraan*. BP-FKIP UMS.
- Sulisworo, D. (2012). Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional. Hal 2.
- Suryadi, K. (1999). Demokratisasi Pendidikan Demokrasi. Dalam Masyarakat Versus Negara: Paradigma Baru Membatasi Dominasi Negara.

- Ulfah, N., Hidayah, Y., & Trihastuti, M. (2021). Urgensi Etika Demokrasi di Era Global: Membangun Etika dalam. Mengemukakan Pendapat bagi Masyarakat Akademis Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 329-346.
- Wasiyem, Hamidah Purba, dan Muhammad Kaulan Karima. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi. (Medan: Merdeka Kreasi, 2021).
- Winarno. (2001). Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi. (n.p.): Bumi Aksara.
- Winataputra, (2001). Wahana Sistemik Pendidikan Demokrasi: Suatu kajian konseptual dalam konteks pendidikan IPS (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia).
- Zulfikar, M. F., & Dewi, D. A. (2021). Pentingnya pendidikan kewarganegaraan untuk membangun karakter bangsa. *Jurnal Pekan : Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(1), 104-115.